

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan luar negeri adalah sebuah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eskternalnya (Perwita & Yani, 2005: 49). Berbeda dengan politik internasional yang mengedepankan aksi-reaksi, kebijakan luar negeri lebih menitikberatkan kepada cara sebuah aktor Hubungan Internasional (HI) dalam hal ini adalah negara untuk mencapai segala yang tertuang dalam kebijakan mereka. Kissinger (1969: 262) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri selalu dipengaruhi oleh situasi politik domestik. Hal ini lazim dikenal sebagai faktor internal dalam kebijakan luar negeri. Untuk mencapai keuntungan dari lingkungan eksternal tersebut, negara tidak bisa mengabaikan situasi politik domestik.

Pada konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) khususnya ke Timur Tengah, situasi politik dalam negeri amat berperan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Louis Fawcett (Fawcett, 2005: 297) memaparkan bahwa ada enam elemen dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri AS, yaitu *The White House, The Executive Branch, The Legislative Branch, Political Parties, Opinion Makers dan The Lobbies*. Dari keenam elemen tersebut, peneliti menyoroti kelompok pelobi dalam penelitian ini. Gabriel Almond memaparkan bahwa para pelobi tergabung ke dalam jenis kelompok kepentingan yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya melalui lobi kepada pemerintah (Almond, 1974: 47). Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa kelompok kepentingan adalah organisasi domestik yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah tanpa mengesampingkan keberadaan publik.

Kelompok lobi yang sangat berperan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah adalah mereka yang pro-Israel (Mearsheimer, 2008:307). John Mearsheimer mendeskripsikannya sebagai kelompok lobi Israel. Tiga di antara kelompok lobi Israel terkuat adalah *The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*, *Anti-Defamation League (ADL)* dan *The Zionist Organization of America (ZOA)*. Ketiganya adalah kelompok lobi yang memiliki pengaruh kuat serta dapat memengaruhi kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh eksekutif dan legislatif di AS. Kelompok lobi Israel memiliki peran untuk melindungi eksistensi Israel melalui kekuatan politik AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contoh kelompok lobi Israel yang pernah dilakukan adalah keputusan pemerintah AS memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mewajibkan Israel untuk melakukan gencatan senjata dan menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan pada saat konflik Israel Hisbullah.

PLO merupakan sebuah kantor perwakilan yang didirikan pada tahun 1964 untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina menjadi satu wadah. PLO adalah sebuah organisasi yang berusaha mewujudkan hak-hak Palestina terhadap Israel dengan cara mengutip perjanjian, resolusi-resolusi Dewan Nasional Palestina yang mana dahulu Palestina merupakan suatu negara. PBB telah menyatakan bahwa integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional (*International Court Justice*) dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Nasional PBB. Jadi, dalam kasus Palestina, keterbatasan kontrol terhadap wilayahnya tidak mengaburkan makna tetap atau berintegritas sebagaimana disyaratkan oleh kriteria Definisi Territori karena hal itu terjadi akibat adanya pendudukan negara asing (Israel).

Pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah

pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

Namun hingga saat ini organisasi tersebut tidak memberikan sebuah jalan keluar terhadap terjadinya masalah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, Hal tersebut membuat Amerika merasa bahwa Palestina tidak ingin melakukan persetujuan damai terhadap Israel. Hingga tahun 2015 dalam masa kepresidenan Barack Obama, Ancaman penutupan kantor PLO di Washington DC telah di utarakan, Saat itu sejumlah anggota kongres Amerika dari kubu republik mendesak pemerintahan Barack Obama untuk menutup kantor perwakilan ini jika Palestina bersikeras untuk menyeret Israel ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) Namun ancaman tersebut diabaikan oleh pemerintahan Obama.

Hubungan antara dunia muslim dengan Amerika Serikat jauh lebih baik, hal ini disebabkan karena usaha Obama dalam berdiplomasi kepada negara-negara muslim seperti ke negara Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia. Pemerintahan Obama banyak melakukan kunjungan untuk merangkul dunia muslim kembali setelah ketidakpercayaan dunia muslim terhadap Amerika Serikat selama masa pemerintahan sebelumnya yaitu George W Bush junior, sehingga hal ini menggambarkan bahwa pada masa Obama hubungan antara Amerika Serikat dengan dunia muslim cenderung lebih harmonis (Cipto, 2011). Keterkaitan negara-negara muslim dengan keberpihakan dengan Palestina sangatlah kuat. Sehingga penutupan PLO hanya ancaman saja pada masa pemerintahan Obama. Tetapi pada masa Pemerintahan Trump ini ancaman itu mendapat perhatian

serius serta menjadi kenyataan Atas dasar kebijakan Donald Trump, Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, mengumumkan pada hari Senin (10/09/2018) AS akan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, D.C.

"Pemerintahan Trump tidak akan membiarkan kantor tersebut tetap terbuka sementara pihak Palestina menolak untuk memulai negosiasi langsung..." ungkap Bolton, menurut rancangan pidatonya Bolton juga dilaporkan akan mengancam Pengadilan Pidana Internasional dengan sanksi jika melakukan penyelidikan terhadap AS dan Israel, Keputusan tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara AS dan para pemimpin Palestina, yang telah memutuskan komunikasi dalam perundingan damai setelah Trump mengumumkan pemindahan Kedutaan AS di Israel ke Yerusalem.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada hal hal yang mengakibatkan Donald Trump membuat kebijakan yang lebih mengarah terhadap pembelaan kepada Israel, serta mencari seberapa besar pengaruh Lobi Israel terhadap Amerika Serikat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Mengapa Donald Trump menutup kantor perwakilan PLO di Washington DC tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui kebijakan Donald Trump menutup kantor perwakilan PLO.
- b. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan Donald Trump.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian yaitu :

- a. Untuk menyelidiki keadaan serta alasan Donald Trump membuat kebijakan menutup kantor perwakilan PLO di Washington DC
- b. Untuk menyelidiki konsekuensi apa yang akan terjadi selanjutnya akibat dari kebijakan tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membuat sebuah tulisan ilmiah dibutuhkan suatu kerangka pemikiran berbentuk diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian sesuai dengan research question untuk menyesuaikan sebuah Teori yang relevan dengan penelitian sehingga penelitian dapat mudah dilakukan.

Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. dan kepentingan tersebut dapat berubah kepentingan internasional ketika suatu negara tersebut menginginkan sebuah tujuan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antar negara negara lain yang memiliki tujuan bersama . kepentingan tersebut dapat di capai melalui tindakan atau usaha usaha yang dilakukan oleh para aktor aktor internasional yang biasanya dapat berupa sebuah kebijakan kebijakan yang dibuat oleh para aktor tersebut.

Sama halnya dalam hal ini penulis akan mengaitkan kepentingan nasional bahkan kepentingan internasional apa yang ingin di capai Amerika Serikat atas dasar kebijakan kebijakan yang dibuat oleh presiden Amerika Serikat saat ini Donald Trump. Karena kepentingan nasional

Amerika Serikat harus di definisikan sebagai kepentingan internasionalnya yang berkaitan dengan kekuasaan, etika, realisme serta idealisme yang terdapat secara khusus dan universal. Kepentingan internasional ini juga sangat menarik untuk dibahas. Selain itu penulis meyakini bahwa kepentingan internasional juga memiliki hasil yang tersimulasi dengan baik dalam gerakan pembelajaran korespondensi umum.

Kebijakan luar negeri pada dasarnya tidak pernah terlepas dari pengaruh politik domestik. Seperti yang dipaparkan oleh Kissinger (1969: 262) bahwa kepentingan nasional berangkat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Banyak yang beranggapan bahwa kebijakan domestik berakhir ketika kebijakan luar negeri dimulai. Namun anggapan tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena politik domestik mempunyai peran yang penting dalam isu-isu internasional. Output yang dihasilkan dalam suatu kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh seberapa rumit struktur politik domestik. AS memiliki sistem politik demokrasi sehingga memungkinkan keberadaan kelompok lobi berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri dihasilkan oleh unsur-unsur domestik seperti eksekutif, legislatif, badan-badan eksekutif dan pengaruh dari kelompok kepentingan atau pelobi (Duncan dkk, 2003:187). Kebijakan politik domestik sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri terutama pada era globalisasi saat ini. Salah satu contohnya adalah kelompok kepentingan di tatanan domestik akan berusaha untuk melobi pengambil kebijakan agar kebijakan luar negeri mereka sesuai dengan kepentingannya (Kegley & Witkoff, 2004: 74). Lovell mengklasifikasikan input atau masukan ke dalam dua bagian yaitu internal dan eksternal (Lovell, 1970: 210). Input internal adalah informasi yang datang dari dalam pemerintah itu sendiri sedangkan input eksternal adalah informasi yang datang dari luar negara. Setiap input yang ada tersebut adalah informasi yang banyak dan belum terseleksi dengan baik mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. Lazimnya informasi yang

ada di dalam input tersebut adalah demand (permintaan), opinion (opini), interest (kepentingan) dan needs (kebutuhan). Pada penelitian ini, input yang akan dibahas adalah kepentingan.

Aktivitas lobi pada intinya adalah sebuah fenomena gunung es antara pemerintah dengan kelompok kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Fawcett, 2005: 297). Secara teori, kelompok lobi tergolong ke dalam kelompok kepentingan. Kelompok lobi memiliki beberapa kriteria diantaranya adalah cultural interest group, business interest group, workers' interest group dan issue specific group (Rourke, 1991: 131). Penelitian ini akan memfokuskan pada cultural interest group. Kelompok lobi ini mewakili etnis, agama ataupun ras tertentu untuk melobi suatu negara atau pemerintahan. Di beberapa negara, kelompok lobi lazimnya memiliki kedekatan dengan partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan (Fawcett, 2005: 298). Dalam penelitian ini, cultural interest group adalah kelompok lobi yang mewakili gerakan politik zionisme berbasis pada paham agama, ras, dan etnis.

Secara teoritis, kelompok lobi biasanya memiliki jaringan yang kuat terhadap Kongres, pemerintah asing, perusahaan, universitas dan pemerintah yang bertujuan untuk memuluskan kepentingannya melalui lobi terhadap perumus kebijakan (Morgan, 1987:106). Pada intinya, gerak dan aktivitas kelompok lobi adalah untuk menyeleraskan kepentingan kelompok dan kebijakan pemerintah. Kelompok lobi atau kepentingan pada intinya adalah suatu diaspora yang berada di luar sistem perumusan kebijakan luar negeri dan bersifat tidak formal. Untuk mendapatkan kepentingan melalui sebuah legalitas dan legitimasi, kelompok kepentingan harus menyeleraskan visi misi mereka dengan kebijakan pemerintah atau bila memungkinkan dapat tumpang tindih (overlap).

Pada studi kebijakan luar negeri, kelompok lobi ini dikenal dengan istilah power of informal structure (Lovell, 1970: 256). Biasanya kelompok ini muncul pada negara yang menganut

sistem terbuka seperti negara Barat. Kekuatan struktur informal ditandai pula dengan kemunculan perkembangan media massa yang sangat baik. Terdapat dua teori lobi yang dikenal dengan istilah pluralis dan elitis (Morgan, 1987:106).

Pluralis adalah sebuah konsep ketika kelompok lobi menjalankan peran penting lebih daripada perumus kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Sedangkan elitis adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok lobi tidak lain adalah sebuah kepanjangan tangan dari pemerintah dan segala aktivitas lobi mereka dikendalikan secara penuh oleh perumus kebijakan. Aktivitas lobi didasari oleh kebutuhan mereka untuk mencapai kepentingan kelompok melalui kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Kelompok kepentingan akan melobi pemerintah baik secara sembunyi maupun terbuka terhadap publik (Lovell, 1970: 256-257).

Kelompok lobi pun menggunakan beberapa macam metode lobi seperti penyuaipan, pemerasan, pemaksaan, penguasaan diskursus publik ataupun pencemaran nama baik (Mearsheimer, 2008: 151). Penggunaan metode lobi tertutup digunakan bila lobi ditujukan secara personal, sementara metode lobi terbuka ditujukan untuk meraih dukungan massa dan opini publik.

Efektivitas lobi Yahudi ini ditentukan dengan memanfaatkan informasi sebagai salah satu upaya melobi elite-elite politik. Pada negara yang menganut sistem terbuka, keterbukaan informasi dan kebebasan berbicara memungkinkan pelobi mempunyai kebebasan untuk mendukung kandidat politik serta memarginalkan oposisi (Mearsheimer, 2008: 140). Kekuatan lobi tersebut diperkuat pula oleh argumen Lovell bahwa tujuan utama dari lobi adalah membentuk opini yang berasal dari informasi agar disesuaikan sedemikian rupa sehingga para pengambil kebijakan pun mau atau terpengaruh oleh lobi mereka (Lovell, 1970: 257). Secara deskriptif, dampak dari lobi dapat terlihat secara nyata ataupun tidak. Hal ini dapat menimbulkan kebijakan yang berstandar

ganda karena keputusan yang diambil perumusan kebijakan akan berseberangan dengan kepentingan nasional mereka ataupun norma dan hukum internasional.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu:

Donald Trump membuat kebijakan menutup Kantor Perwakilan PLO di Washington DC Tahun 2018 karena lebih mengarah terhadap pembelaan kepada Israel, yaitu karena pengaruh Lobi Israel terhadap Amerika Serikat.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku dalam dampak terjadinya kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Penelitian ini dilakukan dengan cara upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi kondisi tersebut yang saat ini sedang terjadi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di dapat merupakan berupa kajian pustaka atau library research, website, video, berbagai tulisan dan berbagai data yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan kualitatif yaitu, yang focus pada pemahaman keadaan social dari sudut pandang partisipan, namun tidak melupakan teknik analisis kuantitatif yang terdiri dari dua sudut pendekatan yaitu, kuantitatif deskriptif dan kuantitatif inferensial. Teknik

penelitian tersebut memungkinkan penulis untuk melakukan pendeskripsian keadaan suatu akibat yang telah terjadi karena kebijakan yang dilakukan Donald Trump tersebut serta juga tidak lupa juga megeneralisasikan kondisi tersebut secara lebih luas.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan deduktif , dimana penulis menggambarkan hal hal yang khusus untuk membuat kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh contoh kongkrit atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi mengenai hal yang di dibahas oleh penulis.

G. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menulis tentang latar belakang masalah yang terjadi.

BAB II

Pada bab ini, penulis akan menulis tentang sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Palestina.

BAB III

Pada bab ketiga , penulis akan menulis tentang kedekatan Donald Trump dengan lobi-lobi Yahudi dan Israel.

BAB IV

Pada bab ini, penulis akan menuliskan tentang pemaparan kesimpulan yang akan disampaikan.

